

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan, sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan pencalonan kepala daerah oleh partai politik mengalami turbulensi. Peran pengurus pusat partai politik yang bisa menganulir keputusan yang ada didaerah memicu pecahnya kesatuan partai antara pengurus pusat dan pengurus daerah. Ketidaksiapan partai politik menyebabkan hubungan kepengurusan lebih sentralistik dan tidak memberikan wewenang luas kepada pengurus daerah untuk melakukan rekrutmen politik khususnya penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Kelemahan UU Partai Politik yang membuka ruang bebas kepada pengurus pusat untuk bisa menganulir keputusan pengurus daerah perlu diperbaharui kembali. Keputusan partai politik dalam mengambil keputusan penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan ditentukan oleh pengurus daerah sebagai bentuk model alternatif untuk mendorong peran pengurus daerah dalam menggerakkan mesin partai dan menjaga keutuhan partai politik selama mengikuti pemilihan kepala daerah.

B. Saran

Hasil penelitian diatas perlu ditindaklanjuti dengan beberapa saran dari peneliti, yaitu :

1. Mendorong semua partai politik untuk bisa mengubah kebijakan penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik dalam bentuk AD/ART dan/atau dalam bentuk peraturan organisasi yang mengikat pengurus partai politik.
2. Mendorong perubahan UU Partai Politik yang didalamnya bisa mengakomodir kepentingan pengurus daerah dalam menentukan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung oleh partai politik yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

Buku

- A.A. Said Batara & Moh. Dzulkiah Said, 2010, "Sosiologi Politik; Konsep & Dinamika Perkembangan Kajian", C.V Pustaka Setia, Bandung.
- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Siyasah*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur.
- Amin Suprihatini, 2008, *Partai Politik di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.
- Arifin Rahman, 2002, "Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional", SIC Surabaya.
- Firmansyah, 2008, *Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Politik Di Era Demokrasi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hesel Nogi Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- I ketut Putra Erawan *et.al.*, 2010, *Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab I Manajemen Sumberdaya Manusia Politik*.
- Ichlasul Amal, 1996, *Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- Jimli Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- Koirudin, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, cet. IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Oksidelfa Yanto, 2005, Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Tatanan Demokrasi: Antara Harapan dan Kenyataan, *Jurnal: Dinamika Masyarakat (Partai Politik)*. 2005, hlm 641

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media, Jakarta.
- Rully Chairul Azwar, Pengembangan SDM Partai Politik : Rekrutmen dan Kaderisasi di Partai Golkar, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.
- Rusadi Kantaprawira. 2004, *Sistem Politik Indonesia*. Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Rush *et.al*, 2000, *Pengantar Sosiologi Politik*. (diterjemahkan dari judul aslinya *Introduction to Political Sociology* oleh Kartini Kartono). PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ketujuh, Jakarta.
- Sahid Gatara, 2007, *Sosiologi Politik : Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Pustaka Setia, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudijono dan Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*. SIKIP Press, Semarang.
- Ayu Maharani, 2017, *Makalah Pendidikan Pancasila: (Etika Politik dan Pemerintahan)*. Pekanbaru.
- Afan Gaffar, 2006 *Politik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Alfian, 1987, *Pemikiran Politik dan Pembangunan Politik di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Amal, Ichlasul, 1996, *Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- Fadillah Putra, 2003, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gatara, Sahid, 2007, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*: Cv Pustaka Setia, Bandung.
- Jimli Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI), Jakarta.
- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar Semarang.

- Koirudin, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi, cet. IV*: (Gramedia Pustaka Utama), Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.
- Sastroatmodjo Sudijone, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP Semarang Press.
- Sigit Pamungkas, 2011, *Partai Politik: teori dan praktik di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, Jakarta.
- Sudijono, Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Surbakti, Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Polilik*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syafiie Inu Kencana, 2007, *Ilmu Pemerintahan*, edisi revisi: Mandar Maju, Bandung.
- Widagdo, H. B, 1999, *Managemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Yudi Latif. *Negara Paripurna*, 2011, Cetakan Ketiga: (Gramedia Pustaka Utana), Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Jurnal dan Modul:

- Ainur Rofieq, Fungsi Rekrutmen Politik Pada Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2009, *Jurnal governance, Vol.1, No. 2, Mei 2011*
- Irawati Hatta, “Analisis Rekrutmen Calon Walikota Dan Wakil Walikota Balikpapan Oeh Partai Golkar Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015”, *eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 3, 2016*
- Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi, Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi 2016*

Maswadi Rauf, Perkembangan UU Bidang Politik Pasca Amandemen UUD 1945, Tulisan ini disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar, Bali, pada tanggal 14-18 Juli 2003.

Sugeng, Rekrutmen Politik Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Pekanbaru Tahun 2014, *Jom Fisip Vol. 2 No. 2 – Oktober 2015*

Internet :

<http://www.pusako.or.id/index.php/105-memulai-pembaharuan-partai-politik>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017.

<http://mediacerdasbangsa.com/idris-rahim-tumbal-otoritarianisme/>, diakses pada tanggal 17 April 2017

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2017

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2017

<http://www.pusako.or.id/index.php/99-penelitian-pembaharuan-partai-politik-di-indonesia>, diakses pada tanggal 25 September 2017.

Rully Chairul Azwar, Pengembangan SDM Partai Politik: Rekrutmen dan Kaderisasi di Partai Golkar, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, <https://adiyadhriyadh.files.wordpress.com/2015/12/artikel-kaderisasi-parpol.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017